

Model pembinaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah padat perkotaan: kasus Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Idup Suhady, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=98293&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada Hakikatnya setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan serta pencemaran (UU No. 4/ 1982). Dalam Hal kebersihan lingkungan. Pemerintah DKI Jakarta berkewajiban membina kebersihan dan setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitas pekarangan masing-masing (Perda No. 5/1988). Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan limbah padat perkotaan sebagai bagian dari pelayanan kebersihan lingkungan kota menghendaki adanya peranserta masyarakat bersama dengan pemerintah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan terhadap seluruh warga kota, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi kendala yang serius, pertama tidak ada keseimbangan antar alokasi anggaran dengan luas lingkup pelayanan kebersihan; kedua rendahnya penerimaan retribusi kebersihan termasuk ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai pelayanan kebersihan yang demikian luas, yang kemudian menyebabkan pelayanan yang tidak memadai sehingga tidak setiap warga kota memperoleh pelayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pelayanan kebersihan kota perlu dicari pemecahan yang tepat sesuai dengan ciri-ciri khas dari sistem pengelolaan limbah padat perkotaan yang bersifat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan pokok yang diobservasi adalah sebagai berikut:

Faktor apa saja menghambat pengelolaan limbah padat?Pada tahap dan sejauh mana diperlukan peranserta masyarakat?Bagaimana sebaiknya pembinaan peranserta masyarakat dilaksanakan?Model bagaimana yang harus dikembangkan dan diterapkan agar dapat mewujudkan pelayanan pengelolaan limbah padat secara berlanjut?

Jenis Penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan panduan grounded research yang bertujuan mengembangkan model institusi dan tatalaksana yang mampu meningkatkan peranserta masyarakat.

Berdasarkan pengamatan pertama kali terhadap permasalahan penelitian, dirumus hipotesis kerja: bentuk institusi dan tatalaksana pembinaan peranserta masyarakat mempunyai pengaruh terhadap kesadaran, rasa memiliki lingkungan dan masyarakat dalam berperanserta dan bekerja bersama dengan pemerintah dalam pengelolaan limbah padat perkotaan secara berlanjut.

Dari Hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa pada umumnya kepatuhan responden untuk membayar retribusi relatif tinggi, tetapi kurang banyak mengerti dari memahami kebijaksanaan pemerintah tentang

retribusi kebersihan dan hubungan antara kesehatan lingkungan dengan penanggulangan limbah padat. Responden juga mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah mengenai cara yang tepat dalam menanggulangi limbah mereka.

Perilaku kebersihan (membuang limbah padat disembarang tempat) responden yang tidak mendukung penanggulangan limbah padat disebabkan oleh kurangnya informasi dan penyuluhan yang diberikan pada mereka. Oleh sebab itu dirasakan bahwa institusi yang ada perlu dikembangkan dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran, rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam pengelolaan kebersihan lingkungan kota. Selanjutnya dapat diidentifikasi adanya tingkat peranserta masyarakat yang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh:

Status Ekonomi, dilihat dari tingkat penghasilan kebanyakan penduduk kota, para responden dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kemampuannya membayar retribusi juga rendah. Meskipun demikian kelompok ini merupakan produsen limbah yang tidak sedikit dan menuntut lebih banyak pelayanan. Sebaliknya kelompok orang-orang yang berpenghasilan tinggi pada dasarnya mampu membayar retribusi tinggi. Namun demikian keterlibatan fisiknya dalam penanggulangan limbah padat relatif rendah, dan mereka senang mendapat pelayanan pemerintah kota.Perbedaan tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan diantara kelompok masyarakat.Tidak tegasnya penerapan sanksi, kurang tepatnya ketentuan pemberian insentif dan mutu sistem pemantauan.

Data Hasil penelitian menunjuk adanya permasalahan sebagai berikut:

Institusi dan tatalaksana pengelolaan limbah padat terpisah dengan pengelolaan retribusi kebersihan, padahal dalam kenyataan merupakan kegiatan yang saling terkait dan harus terintegrasi agar tidak menghambat kelancaran pengelolaan.Tidak ada koordinasi perencanaan terpadu dalam penanggulangan limbah padat antar institusi terkait. Penanggulangan limbah padat tidak hanya merupakan tugas dan fungsi dinas kebersihan melainkan juga menjadi tugas dan fungsi dinas-dinas otonom lainnya seperti dinas pertamanan, dinas pekerjaan umum, PD Pasar Jaya dan institusi pemerintah pusat seperti badan pelaksana proyek induk sungai cisadane-ciliwung.Penyuluhan untuk menumbuhkan dan mengembangkan peranserta masyarakat belum intensif, meluas dan merata karena dinas kebersihan masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.Prosedur dan proses pembayaran retribusi belum diselenggarakan secara tepat dan efektif sehingga penerimaan retribusi rendah.

Dari analisis data dapat diketahui adanya beberapa model institusi dan tatalaksana yang dapat dikembangkan dalam peningkatan peranserta masyarakat sebagai berikut:

Model institusi pembina peranserta masyarakat yang mempunyai unsur-unsur staf, unsur pelaksana (Jabatan Fungsional Penyuluh sebagai ujung tombak pembinaan peranserta masyarakat), dan unit penyuluhan keliling.Model koordinasi perencanaan terpadu untuk meningkatkan peranserta ditingkat institusi terkait dan untuk keterpaduan program pembinaan peranserta masyarakat.Model penyuluhan yang terintegrasi antara kebersihan lingkungan retribusi dilengkapi dengan paket-paket terprogram sesuai kelompok masyarakat sasaran penyuluhan.Model pembayaran retribusi dan model penanggulangan limbah padat oleh swadaya masyarakat.

.....In principle every person is responsible to maintain the living environment, to prevent and overcome damage and its pollution (Law. no 4 1982). With regard to environmental cleanliness in the Jakarta region, every citizen is obligatory to maintain the cleanliness for the living environment up to the sidewalks to houseyard (local law no. 5 1988). Based on the above mentioned provisions, the overcoming of urban solid waste as a part of city environmental cleansing management needs the involvement of both the whole community and the government as well.

In the framework of cleaning services to be provided to the whole citizen, the government of DKI Jakarta is being faced serious constraints, i.e. First, There is an imbalanced ratio between budget allocation and the coverage of cleaning services: second, low charges of cleaning retribution imply inability on the part of the government to cover the total cost of cleaning services which subsequently cause poor services so that not every citizen is equally provided with the government's services. Thus, the implementation of city cleaning services should find suitable solutions that suit the specific characteristics of urban solid waste management systems in the frame of community and the government partnership.

The salient problems to be observed are as follows:

- what factors hinder the existing solid waste management?
- At what level and to what extent is community participation needed?
- How should the development of community participation be implemented?
- What model should be developed and implemented in order to render the solid waste management services sustainable?

The type of approach used in the research is a combination of qualitative and grounded research. It is aimed to find and develop institutional model and procedure for more effective solid waste management which will be capable of enhancing community participation.

Based on the first observation on the research problems a working hypothesis was formulated it is needed a kind of institution and procedural development for people's participation that could give impact on their environmental consciousness and sense of belonging; under which the people and the government could work together in the continuous management of urban solid waste.

From the results of the research it was found that in general the obedience of the respondents to pay the retribution was relatively high but they have low understanding on the government policy regarding cleansing retribution and the relationship between healthy environment and solid waste management due the respondents have low level of knowledge on the right way to handle their waste.

The cleanliness behavior (improper storing and disposal of the solid waste) which does not support good solid waste management is due to the lack of information and extension services provided to them. For the reason, it felt that an institution is needed to develop and direct community participants to grow and develop their awareness, sense of belonging and responsibility to actively participate in the management of the cleanliness of the city environment.

Further, it was identified that there are some different levels of community participation. Such condition is

influenced by:

- Economic Status, viewed from the level of income of the low income group, so that their abilities to pay retribution are also low, even though this group is positively the major producer of urban solid waste and hence demand more services, on the other hand, the group of the people with high income are basically capable to pay high retribution. Even though their rate of physical involvements in the handling of the solid waste are low, they enjoy good services provided by the city government in return of their high retribution.
- The different levels on knowledge and awareness toward cleanliness and healthy environment among groups of people.
- Improper sanction enforcement, inappropriate provision of incentives, and the existing weak quality of monitoring system.

Data of research indicate the following problems:

- Institution and procedure of solid waste management are evidently separated from the cleaning retribution management. In fact, it is actually interconnected activities that should be integrated in order to avoid inappropriate management.
- There is no integrated planning coordination in the handling of solid waste among the interconnected institutions. Solid waste handling is not only the task and function of the DKI cleaning department Dinas Kebersihan but it is also the task and function of the other DKI autonomous department such as those concerned with park, public works, Cisadane-Ciliwung river project implementation agency and local government owned company Pasar Jaya.
- Extension services to promote and develop the community participation was not being carried out intensively and equally due to the fact that responsible cleaning departments are still being with limited budget and human resources.
- The procedures and process of charging the retribution have not been effectively and properly managed, resulting to low retribution revenue.

Data Analysis shows that some models of institution and procedures to enhance community participation could be developed in the following ways:

- Developing the institution models for community participation by rearrangement of the existing components, including staff and line components and mobile unit of extension services. In the institution, the functional position of extension service agents as the community participations can be developed;
- Integrated planning coordination models to enhance the community participation on the level of government institutions and integrated programme in developing community participation.
- Integrated extension service models related with environmental cleanliness and retribution payment, supported by programmed packages are highly relevant to the community extension's target groups.
- Retribution payment model and community solid waste management models.